

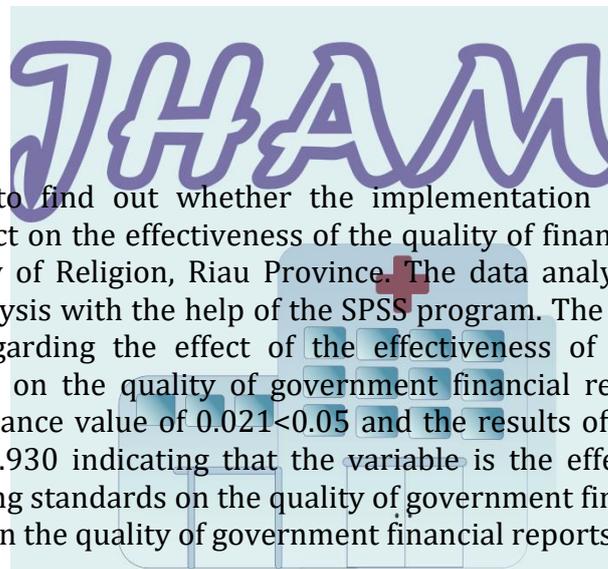
THE INFLUENCE OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING IN THE REGIONAL OFFICES OF THE MINISTRY OF RELIGION, RIAU PROVINCE

PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Yolanda Saftri Nelaz¹⁾, Dinna Nurhasanah²⁾

Universitas Awal Bros

Email: yolanda@univawalbros.ac.id



ABSTRACT

This research aims to find out whether the implementation of government accounting standards has an effect on the effectiveness of the quality of financial reports at the Regional Office of the Ministry of Religion, Riau Province. The data analysis method used is simple linear regression analysis with the help of the SPSS program. The results of research that has been carried out regarding the effect of the effectiveness of implementing government accounting standards on the quality of government financial reports show that Tcount is 33.968 with a significance value of $0.021 < 0.05$ and the results of the regression test show a coefficient value of 0.930 indicating that the variable is the effectiveness of implementing government accounting standards on the quality of government financial reports. positive and significant influence on the quality of government financial reports.

Keywords : Effectiveness, Accounting Standards, Quality Of Financial Reports

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh efektivitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan program spss. Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa Thitung 33,968 dengan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien 0,930 menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci : Aktivitas, Standar Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggung jawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk sistem yang tepat.

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam hal desentralisasi keuangan dan otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan suatu paket kebijakan tentang pengelolaan keuangan negara yaitu: Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berbagai peraturan serta perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan telah disusun guna dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government* (Nurlaela, 2010:2).

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau full disclosure.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Paragraf 9) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi

dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Khusus untuk karakteristik kualitatif relevan, sebuah informasi dalam laporan keuangan pemerintah dinyatakan memiliki nilai relevan jika informasi tersebut memenuhi empat kriteria, yang terdiri dari nilai umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timelines*) dan lengkap (*completeness*).

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Sehubungan dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul yaitu **“Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau”**.

METODE

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrua (PMK 270/ PMK 05/ 2014)

SAP Berbasis Akrua adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrua dipemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan

oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan siklus anggaran.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrua (PMK 270/ PMK 05/ 2014)

Penerapan SAP Berbasis Akrua menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi, Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

3. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Nurlaila (2014: 31) menyatakan bahwa efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Suatu sistem dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mahmudi (2011:271), Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

5. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Revrison Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Negara/Lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan siklus anggaran.

Penerapan SAP Berbasis Akruar menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi, Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulaidari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk BUN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran Negara. Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk Kementerian/Lembaga dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Kementerian/Lembaga memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lain-Lain.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Variabel	Indicator	Nilai	Keterangan
X	penerapan SAP		
	P1.X	0,613	valid
	P2.X	0,410	Valid
	P3.X	0,454	Valid
	P4.X	0,482	Valid
	P5.X	0,769	Valid
	P6.X	0,620	Valid
	P7.X	0,189	Tidak valid
	P8.X	0,475	Valid
	P9.X	0,604	Valid
P10.X	0,672	Valid	
Y	Kualitas Laporan Keuangan		
	P1.Y	0,819	Valid
	P2.Y	0,664	Valid
	P3.Y	0,156	Tidak valid
	P4.Y	0,509	Valid
	P5.Y	0,607	Valid
	P6.Y	0,619	Valid
	P7.Y	0,424	Valid
	P8.Y	0,451	Valid
	P9.Y	0,432	Valid
P10.Y	0,819	valid	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel X pertanyaan no.1 sampai 10 dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari 0,3 kecuali pertanyaan no.7 tidak valid (0,189) karena lebih kecil dari 0,3. Sedangkan variabel Y pertanyaan no.1 sampai 10 dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari 0,3 kecuali pertanyaan no.3 tidak valid (0,156) karena r hitung lebih kecil dari 0,3.

b. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alpha	Ket
1	Penerapan SAP	0,730	reliabel
2	Kualitas laporan keuangan	0,742	reliabel

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui angka alpha dari variabel Penerapan SAP adalah 0,730 dan angka dari variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah 0.742. jadi angka tersebut (0.730 dan 0,742) lebih besar dari minimal alpha 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan dapat dikatakan Reliabel atau Handal.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.638	1.076		2.451	.021
Penerapan SAP	.930	.027	.988	33.968	.000

a. Dependent Variable: kualitas laporan Keuangan pemerintah

Dari hasil regresi yang diperoleh Maka dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 2,638 + 0,930 X$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta (a) sebesar 2,638 yang berarti bahwa jika kualitas laporan keuangan pemerintah tidak dipengaruhi oleh variable penerapan system akuntansi pemerintahan (SAP), maka besarnya variable kualitas laporan keuangan sebesar 2,638.
- b) Koefisien regresi kualitas laporan keuangan pemerintah bernilai positif sebesar 0,930 hal ini menunjukkan penerapan system akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

3. R square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 ^a	.976	.975	.502

a. Predictors: (Constant),

kualitas laporan keuangan pemerintah

R sqaer menggambarkan seberapa besar variabel indepen den secara bersama-sama dapat menjelaskan depenennya. Pada gambar 5.4 terlihat besarnya R sqaer untuk penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 0.976

atau 97.6%. dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh efektivitas penerapan standara kuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah 97.6% yang artinya sangat berpengaruh. Sedangkan sisanya (2.4%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil uji pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa T hitung 33,968 dengan nilai signifikansi 0,021 < 0,05 dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien 0,930 menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 97,6% dan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan standar akuntansi pemerintahan semakin baik maka semakin berkualitas juga laporan keuangan pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sesuai dengan yang diharapkan memerlukan peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dalam hal ini adalah standar akuntansi pemerintah.

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka

tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kasmenuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau full disclosure.

SAP Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dipemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Secara garis besar hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sudah sangat efektif, sedangkan kualitas laporan keuangan

pemerintah pun sudah sangat berkualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS. Subjek dalam penelitian ini adalah 30 pegawai kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bagian keuangan. Dengan 10 koesinier yang disebarakan.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa Thitung 33,968 dengan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$ dan hasil uji regresi nilai koefisien 0,930 menunjukkan bahwa variable efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang ada, adapun saran yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, sebaiknya staf pemerintah pada kantor wilayah kementerian agama lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integrasi yang tinggi sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan.
2. Selain itu untuk karyawan/staf pada kementerian agama yang telah mengikuti sosialisasi mengenai standar akuntansi pemerintahan dan sudah memiliki kemampuan atau kompetensi dibidangnya diharapkan tidak dipindahkan kebagian yang lain dan menggantikannya dengan karyawan yang baru sehingga kualitas dari laporan keuangan tersebut akan terjaga dan lebih bias ditingkatkan lagi.
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar memperluas objek penelitian dan menggunakan deskriptif kualitatif dan

kuantitatif dalam penggunaan metode analisis penelitian

Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal, Ekonomi Bisnis. Vol.13 No.1

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada pihak yang telah membantu hingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Muindro, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit PT MitraWacana, Jakarta

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres. Yogyakarta.

Mardiasmo 2002. *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. Andi. Yogyakarta.

Munawir, 2010, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi keempat. Penerbit. Liberty, Yogyakarta.

Revrisond Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE

Ningtyas E.A (2015). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal, Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4 No.1

Nugraeni, M. Budiantara (2015). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja*. Jurnal, Dinamika Ekonomi & Bisnis. Vol.12 No.1

Nugraheni Purwaniati, Subaweh Imam (2008). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap*

